



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 061/Kep.535-ORG/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1A ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap implementasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terhadap ketercapaian Kegiatan Utama dan Indikatornya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Hasil evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, untuk disampaikan kepada Tim Penilai Nasional.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.535-ORG/2024
TENTANG
RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
GENERAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100	Persentase	Penetapan Perkada tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah Dinas dan Badan) yang telah mempedomani model penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi		5 Dokumen			5 Dokumen	5	Dokumen						Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Hukum)
					Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional dalam rangka Penyesuaian Jabatan pada Dinas SDABM, Dinas Ciptabintang, DPKP dan DLH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	10.560.000	Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					yang terdampak Penyederhanaan Struktur Organisasi														
					Pengusulan Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina masing-masing Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4	Laporan						Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
					Pengusulan Surat Usulan Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional ke Kementerian PANRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4	Laporan						Setda (Bagian Organisasi)	Setda (Bagian Organisasi)
					Koordinasi ke Kementerian PANRB terkait Perpindahan Jabatan Fungsional yang sudah pernah disetarakan sebelumnya			1 Laporan		1 Laporan	1	Laporan						BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Pengusulan pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional pada Dinas SDABM, Dinas Ciptabintang, DPKP dan DLH yang terdampak Penyederhanaan Struktur Organisasi melalui Pertek BKN dan Rekomendasi Kemendagri				1 Laporan	1 Laporan	1	Laporan				10.000.000	10.000.000	BKPSDM	BKPSDM
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	100	Persentase	Sosialisasi Sistem kerja Fleksibilitas Berkerja Pegawai		25%	25%	50%	100%	Laporan	Perangkat Daerah/Unit Kerja		8.250.000	8.250.000	8.250.000	16.500.000	Setda (Bagian Organisasi)	
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.4	Indeks Skala 5	Melakukan Monitoring, review Indeks dan tindak lanjut hasil Review SPBE	1	1	1	1	4	Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Monev triwulanan	3.368.200	25.395.600	3.663.000	3.663.000	36.089.800	Diskominfo	Tim Monev SPBE sesuai SK / Kepwal / SP
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	3	Indeks	Survey Kondisi eksisting pendukung, menyusun Arsitektur SPBE dan inputing data arsitektur SPBE kedalam SIA (Sistem Informasi Arsitektur) SPBE		3			3	Dokumen	Tersusunnya Arsitektur SPBE 2024		251.700.000			251.700.000	Diskominfo	Tim Arsitektur SPBE sesuai SK /Kepwal / SP

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	23.5	Poin	Penyusunan Rencana Aksi Tematik		Tersusunnya rencana aksi tematik mandatory dan Tematik Lokal,			1	Laporan	Jumlah laporan rencana aksi tematik mandatory dan Tematik Lokal,						Bappelitbang	
					Verifikasi keselarasan Rencana Aksi Tematik dengan Renja/DPA PD tahun 2024		Melakukan verifikasi keselarasan Perencanaan Mikro Tematik dengan Renja/DPA PD 2024			1	Laporan	Jumlah laporan hasil verifikasi keselarasan Perencanaan Mikro Tematik dengan Renja/DPA PD 2024	454.580.800	274.655.800	281.084.050	99.476.878	1.109.797.528		
					Membantu penyusunan perencanaan mikro Tata Kelola Pemerintahan (RB General)		Tersusunnya cascading kinerja Tata			1	Laporan	Jumlah laporan cascading kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General)	71.210.000	147.500.000	193.202.000	50.880.000	462.792.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
							Kelola Pemrintahan (RB General)												
					Optimalisasi Integrasi Aplikasi (Esakip dan MangBagja) untuk monitor capaian IKU Pemda dan PD / Sasaran Stategis , Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaranya	Terintegrasi data perencanaan dan realisasi kinerja berkala tahun 2024 pada seluruh PD pada aplikasi Esakip dengan SKP pegawai Pem				1	Laporan	Jumlah laporan Integrasi Aplikasi (Esakip dan MangBagja)	28.899.000	-	-	-	28.899.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					erintah Kota Bandung pada aplikasi Managja														
		Nilai SAKIP																	
		Perencanaan Kinerja	23.5	Poin	Penyusunan Rencana Aksi Tematik		Tersusunnya rencana aksi tematik mandatory dan Tematik Lokal,			Laporan	Jumlah laporan rencana aksi tematik mandatory dan Tematik Lokal,	454.580.800	274.655.800	281.084.050	99.476.878	1.109.797.528	Bappelitbang		
	Verifikasi keselarasan Rencana Aksi Tematik dengan Renja/DPA PD tahun 2024					Melakukan verifikasi keselarasan Perencanaan		Laporan	Jumlah laporan hasil verifikasi keselarasan Perencanaan Mikro Tematik dengan Renja/DPA PD 2024										

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
							aan Mikro Tematik dengan Renja/DPA PD 2024												
					Membantu penyusunan perencanaan mikro Tata Kelola Pemerintahan (RB General)		Tersusunnya cascading kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General)				Laporan	Jumlah laporan cascading kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General)	71.210.000	147.500.000	193.202.000	50.880.000	462.792.000		
					Optimalisasi Integrasi Aplikasi (Esakip dan MangBagja) untuk monitor capaian IKU Pemda dan PD / Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Anggaranya	Terintegrasi data perencanaan dan realisasi kinerja berkala tahun					Laporan	Jumlah laporan Integrasi Aplikasi (Esakip dan MangBagja)	28.899.000	-	-	-	28.899.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
						2024 pada seluruh PD pada aplikasi Esakip dengan SKP pegawai Pemerintah Kota Bandung pada aplikasi ManBaGa													
		Pengukuran Kinerja	24.5	Poin	Reviu Cascading RPD, RB Tematik Mandatory dan lokal bahan reviu perencanaan pemda tahun 2024 dan RKPDPD 2025		Tersusunnya dokumen hasil reviu Perencanaan mikro				Dokumen	Jumlah Dokumen hasil reviu Perencanaan mikro Tematik mandatory dan Tematik Lokal, disertai data kinerja dan Rencana Aksi	144.261.909	99.079.000	99.079.000	139.532.000	481.951.909	Bappelitbang	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
							Tematik mandatori dan Tematik Lokal, disertai data kinerja rja dan Rencana Aksi												
					Reviu IKU RPD dan Renstra PD dengan Subtansi definisi Operasional , Formulasi , Penanggung jawab Anggaran	Dokumen PK Tahun 2024 hasil reviu/ verifikasi		Tersusunnya dokumen hasil Reviu IKU RPD dan Renstra PD tahun 2024			Dokumen	Jumlah dokumen hasil Reviu IKU RPD dan Renstra PD dengan Subtansi definisi Operasional , Formulasi , Penanggung jawab Anggaran	596.113.585	792.304.050	484.242.675	409.491.500	2.282.151.810		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Melaksanakan Monev berkala Tematik Mandatory, Lokal dan General dengan keterlibatan pimpinan serta tindaklanjut perbaikan strategis		Melakukan monitoring berkala atas pelaksanaan perencanaan tematik Mandatory dan Tematik Lokal	Melakukan monitoring berkala atas pelaksanaan perencanaan tematik Mandatory dan Tematik Lokal	Melakukan monitoring berkala atas pelaksanaan perencanaan tematik Mandatory dan Tematik Lokal		Laporan	Jumlah laporan hasil monev berkala Tematik							
Pelaporan Kinerja	12	Nilai	Persiapan Tim penyusun Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja	1		-	-	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			188.446.900				Setda (Bagian Organisasi)		
			Pengumpulan Analisis Data Capaian Kinerja IKU Kota												Setda (Bagian Organisasi)				
			Asistensi Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja dalam rangka verifikasi dan validasi terhadap data akhir target Perangkat Daerah yang ter-								83.237.000								

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					tuang dalam Dokumen Perencanaan dalam bentuk Berita Acara														
					Asistensi Perangkat Daerah (unit kerja) /Penyusunan LKIP Kota													Setda (Bagian Organisasi)	
					Pengolahan dan verifikasi data capaian capaian kinerja											28.600.000		Setda (Bagian Organisasi)	
					Penyampaian Draft LKIP Kota pada Inspektorat (untuk di reviu)													Setda (Bagian Organisasi)	
					Penyelarasan dan verifikasi data Akhir hasil reviu APIP Inspektorat													Setda (Bagian Organisasi)	
					Penandatanganan Walikota dan Penyampaian LKIP ke Kementerian PAN-RB (melalui esr.menpan.go.id)													Setda (Bagian Organisasi)	
														98,440.000					

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
		Evaluasi Kinerja	20,9	Nilai	1. Melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah; 2. Melakukan Sosialisasi Perwal Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Perangkat Daerah; 3. Pembuatan Sistem/Aplikasi terkait Evaluasi AKIP 4. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP	-	-	-	20,9	20,9	Nilai	Nilai Capaian Komponen Evaluasi Kinerja pada Penilaian SAKIP Kota Bandung	599.494.000	-	-	-	599.494.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	98	Jenis Pelayanan Digital	1. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi pelayanan MPP Kota Bandung untuk menginvestarisasi pelayanan publik yang diselenggarakan secara digital.			98		98	Jenis Pelayanan	Tersedianya pelayanan digital dari Perangkat Daerah dan instansi pelayanan MPP Kota Bandung						DPMPPTSP	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					2. Menyampaikan laporan hasil Koordinasi dan inventarisasi ke DPMP TSP Prov. Jabar.			1		1	Laporan	Laporan Hasil Inventarisasi Pelayanan Digital di Instansi MPP Kota Bandung							
					3. Melakukan Koordinasi dengan DPMP TSP Provinsi Jabar terkait pembaruan konten MPP Digital Kota Bandung				1	1	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi terkait pembaruan konten MPP Digital Kota Bandung							
					4. Memfasilitasi sarana Interaktif MPP digital di Gedung MPP Kota Bandung				1	1	Laporan	Laporan Fasilitasi sarana Interaktif MPP digital di Gedung MPP Kota Bandung							
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	WBK 4 WBBM 3	Perangkat Daerah	Melakukan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada Perangkat Daerah	-	-	-	WBK 4 WBBM 3	WBK 4 WBBM 3	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	112.840.000	-	-	-	112.840.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	Level	1. Kick off Meeting Penilaian Mandiri (PM) SPIP bagi seluruh perangkat Daerah 2. Pengenalan aplikasi e-SPIP BPKP 3. FGD Perencanaan Sasaran Strategis Prioritas 4. Ekspose Rencana Penilaian Mandiri (RPM) dan Surat Edaran Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 5. Pengisian Data Perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah pada Aplikasi -SPIP 6. Pelaksanaan Penilaian Mandiri oleh Pemda dan Perangkat Daerah (Penilaian Penetapan Tujuan, Penilaian Struktur dan Proses, Penilaian Pencapaian Tujuan)	-	-	-	3	3	Level	Hasil Penilaian BPKP terhadap Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Bandung	369.350.000	-	-	-	369.350.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					7. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) melalui aplikasi e-SPIP 8. Permintaan Evaluasi hasil PM dan PK ke BPKP Perwakilan Jawa Barat														
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	88%	Laporan	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	88%	88%	88%	88%	88%	Laporan	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	118.950.000,00	#####	#####	118.950.000,00	475.800.000,00	Diskominfo	Bidang Diseminasi

9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72	Nilai	Rencana Aksi terhadap Rekomendasi 2: 1.Implementasi dan Internalisasi Kebijakan, Regulasi, Mekanisme Pelaporan/Penge- lolaan Gratifikasi: a. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pencegahan, pelaporan, dan penanganan gratifikasi, dengan memperhatikan pedoman dan regulasi yang berlaku. b. Sosialisasi kebijakan dan prosedur tersebut kepada seluruh pegawai, termasuk pimpinan, untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan internalisasi nilai-nilai integritas. c. Saluran pelaporan gratifikasi (Implementasi mekanisme pelaporan yang aman, anonim, dan mudah diakses, serta memastikan bahwa semua laporan gratifikasi ditindaklanjuti secara serius dan transparan). 2.Menegakkan Sanksi/Hukuman dengan Adil	-	-	-	72	72	Nilai	Hasil Penilaian Survei Penilaian Integritas oleh KPK RI	484.952.000	-	-	-	484.952.000	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
---	------------------------------------	-----------------------------------	----	-------	---	---	---	---	----	----	-------	---	-------------	---	---	---	-------------	-------------	--------------------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	CUKUP	(50-64,99)	Bagian Hukum sebagai Admin IKK Kota Bandung, antara lain : - Melaksanakan Sosialisasi IKK dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah - Menginventarisir Produk Hukum Daerah yang terbit 3 tahun terakhir dan berlaku efektif paling singkat 1 tahun untuk diusulkan sebagai populasi ke LAN RI - Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait data enumerator - Mengirimkan data enumerator ke LAN - Melakukan pemantauan penginputan eviden oleh enumerator - Melakukan Evaluasi hasil pelaksanaan penilaian IKK LAN	-	-	1	-	1	Persentase	Tersampainya data enumerator masing-masing perangkat daerah ke LAN RI	-	-	-	-	-	Bappelitbang dan Setda (Bagian Hukum)	Bappelitbang dan Setda (Bagian Hukum)

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Capaian BAIK	(76,62)	Memfasilitasi koordinasi Harmonisasi Peraturan Daerah	1	1	1	1	4	Dokumen	Terlaksananya fasilitasi Koordinasi Harmonisasi Peraturan Daerah	1	1	1	-	3	Setda (Bagian Hukum)	Setda (Bagian Hukum)
					Mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	-	-	-	-	-	Persentase	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	-	-	-	-	-	Setda (Bagian Hukum)	Setda (Bagian Hukum)
					Meningkatkan kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Daerah	1	1	1	1	4	Dokumen	Tercapainya kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Daerah	1	1	1	-	3	Setda (Bagian Hukum)	Setda (Bagian Hukum)
					Meningkatkan penataan Database Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	1	1	Laporan	Terbangunnya JIDH yang Terintergrasi dengan Portal JDIHN	-	-	-	-	-	Setda (Bagian Hukum)	Setda (Bagian Hukum)

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	1,98	Nilai	Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2023			60		60	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Perwal Nomor 42 tahun 2023			19,980,000		Disarpus		
					Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI Versi 3		60		60	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SRIKANDI versi 3		33,999,750						
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,3	Indeks	Pembuatan Dokumen Manajemen Data	8				8	Dokumen	Terbentuknya Modul Manajemen Data Terstandar dan Terintegrasi	8.865.000				8.865.000	Diskominfo	Diskominfo
					Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Statistik Sektoral		60		60	Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisai Manajemen Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi		20.800.000			20.800.000	Perangkat Daerah		
					Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Data		30		30	Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Data		4.875.000			4.875.000	Perangkat Daerah		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH				
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA			
												Terstandar dan Terintegrasi										
					Bimtek Identifikasi Potensi dan Kebutuhan data				30		30	Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Bimbingan Teknis Identifikasi Kebutuhan Data				17.000.000				17.000.000	Perangkat Daerah
					Penyusunan Daftar Data dan Kalender Data				1	1	2	Dokumen	Terbentuknya Dokumen Daftar Data dan Kalender Data				990.000			990.000	1.980.000	Diskominfo
					Monitoring Evaluasi Pemahaman Manajemen Pengelolaan Data				1	1	2	Dokumen	Terbentuknya Dokumen Pemahaman Manajemen Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi							131.109.380	131.109.380	Diskominfo
					Transformasi pengelolaan data terstandar dan terintegrasi untuk menunjang kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dengan predikat baik	1 Dokumen manajemen Data	1 Dokumen Pelaksanan Sosialisasi dan	1 Dokumen daftar data dan kalender data	1 Dokumen monitoring evaluasi dan pere	4	Indeks	Indeks Pembangunan Statistik	8.865.000	25.675.000	17.990.000	132.099.380	184.629.380			Diskominfo		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
							Bimtek Manajemen Data		ncanaan tahun 2025										
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	78	Nilai	Mengeluarkan SE terkait Kewajiban Pemanfaatan SPSE dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung													Setda (Bagian PBJ)	Seluruh Perangkat Daerah
					Monitoring dan Evaluasi Progres Penginputan RUP di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	-	-	-	19,16	19,16	Skor	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25.000.000	-	25.000.000	-	50.000.000		
					Pendampingan serta Monitoring Pemanfaatan Sistem Pengadaan (SPSE) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung														
					Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	-	-	-	18,84	18,84	Skor	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	-	-	-	-	-		Bagian PBJ

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Tingkat Kematangan Level 3 Pro Aktif	-	-	-	40	40	Skor	Tingkat Kematangan UKPBJ	-	-	-	-	-		Bagian PBJ
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Opini	Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD	527.735.500	105.470.000	344.599.333	263.257.500	1.241.062.333	BKAD	BKAD dan seluruh perangkat daerah
												Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Perubahan							
												Persentase rata-rata kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran (sesuai target yang ditetapkan pada RPD)	12.050.000	157.582.000	191.312.500		360.944.500		
												Persentase penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai ketentuan	577.070.445	709.023.003	157.334.900	157.420.845	1.600.849.193		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
												Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai SAP dan disusun tepat waktu	6.391.418.963	6.449.079.823	6.953.385.799	33.321.334.707	53.115.219.292		
					Mewujudkan Kepatuhan Pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Bidang tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN (sesuai target yang ditetapkan pada RPD)	1.836.080.870	3.621.538.076	1.252.885.741	692.527.174	7.403.031.861	BKAD	BKAD
												Persentase Laporan BMD disusun tepat waktu sesuai ketentuan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemkot Bandung	355.439.900	1.384.777.458	274.170.392	310.538.555	2.324.926.305		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
												Persentase Pencapaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan Tanah Milik Daerah sebagaimana target yang ditetapkan pada APBD	869.940.500	517.964.000	579.512.000	375.420.860	2.342.837.360		
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	80	%	1. Melakukan pendampingan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; 2. Melakukan monitoring progres tindaklanjut melalui kegiatan pemutakhiran progres TLHP BPK; 3. Melakukan input data TLHP BPK melalui aplikasi BPK RI	-	-	-	80	80	%	Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK	242.346.250	-	-	-	242.346.250	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	66,80	persentase	Menyempurnakan Profil Jabatan Fungsional	0	0	0	1	1	dokumen	Tersusunnya Profil Jabatan Fungsional	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Terlaksananya Penilaian Kompetensi ASN Dalam Jabatan Fungsional	155	0	0	0	155	orang	Jumlah ASN Hasil Penilaian Kompetensi dalam Jabatan Fungsional	12.815.000	0	0	0	12.815.000	BKPSDM	BKPSDM
					Terlaksananya Sertifikasi ASN Dalam Jabatan Fungsional	0	0	0	50	50	orang	Jumlah ASN yang tersertifikasi dalam Jabatan Fungsional	0	0	0	50.000.000	50.000.000	BKPSDM	BKPSDM
					Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Teknis ASN Dalam Jabatan Fungsional	0	50	0	0	50	Persentase	Jumlah Hasil Pengembangan Kompetensi ASN dalam Jabatan Fungsional	0	704.487.356	0	0	704.487.356	BKPSDM	BKPSDM
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	80,30	persentase	Tersedianya Layanan Assessment Centre	950	150	0	0	1100	orang	Jumlah ASN yang terlayani assessment centre	110.675.000	10.725.000	0	0	121.400.000	BKPSDM	BKPSDM
					Tersusunnya Profil Pegawai melalui simpeg-adm yang terdiri dari Penilaian Potensial (Uji Potensi, Uji Kompetensi, Rekam Jejak) dan Penilaian Kinerja	0	400	400	300	1100	orang	Jumlah Profil Pegawai yang tersusun	0	2.421.000	2.421.000	2.421.000	7.263.000	BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Terlaksananya Pemilihan ASN Berprestasi	0	0	0	9	9	orang	Jumlah ASN Berprestasi	0	0	0	770.387.760	770.387.760	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya Penilaian Kinerja Periodik Pegawai Sesuai Formulasi Penilaian Kinerja Yang Berlaku	15638	0	0	0	15638	orang	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Hasil Penilaian Kinerja Sesuai Formulasi Yang Berlaku	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
					Tersedianya Penilaian Kinerja Periodik Pegawai Sesuai Formulasi Penilaian Kinerja Yang Berlaku	15638	0	0	0	15638	orang	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Hasil Penilaian Kinerja Sesuai Formulasi Yang Berlaku	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	100	persentase	Tersedianya Penilaian Kinerja Periodik Pegawai Sesuai Formulasi Penilaian Kinerja Yang Berlaku	15638	0	0	0	15638	orang	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Hasil Penilaian Kinerja Sesuai Formulasi Yang Berlaku	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
					Tersosialisasikan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepada Seluruh ASN Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	60	0	0	0	63	perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	56.840.000	0	0	0	56.840.000	BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Asistensi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dilaksanakan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022	1	0	0	0	1	kegiatan	Jumlah Kegiatan Asistensi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	34.320.000	0	0	0	34.320.000	BKPSDM	BKPSDM
					Terlaksananya Fitur Tim Kerja pada Aplikasi Mang Bagja sesuai PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022	1	0	0	0	1	fitur	Jumlah Fitur Pengelolaan Tim Kerja Pada Aplikasi Mang Bagja	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
					Tersusunnya Laporan dan penilaian kinerja pegawai periodik pada seluruh Perangkat Daerah	1	1	1	1	4	dokumen	Jumlah laporan penilaian kinerja pegawai pada seluruh Perangkat Daerah setiap bulan	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	377,2	nilai	Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan kebutuhan ASN melalui berbagai jalur pengadaan	0	0	0	1	1	dokumen	Terselenggaranya kegiatan pemenuhan kebutuhan ASN melalui berbagai jalur pengadaan	0	0	0	1561292000	1.561.292.000	BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Mengakselerasi penyusunan talent pool untuk seluruh pegawai serta rencana suksesi yang disusun berdasarkan target dan/atau jabatan Kritisal dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020	0	1	1	0	2	dokumen	Tersusunnya talent pool untuk seluruh pegawai dan rencana suksesi berdasarkan jabatan kritisal dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020	0	1.348.900	1.348.900	0	2.697.800	BKPSDM	BKPSDM
					Menyusun Draf kebijakan internal tentang Manajemen Karier dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2021	0	0	1	0	1	dokumen	Tersusunnya draf kebijakan tentang Manajemen Karier berpedoman pada Permenpan RB nomor 22 Tahun 2021	0	0	10.045.200	0	10.045.200	BKPSDM	BKPSDM
					Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian atas permasalahan kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi	1	1	1	1	4	laporan	Terlaksananya strategi penyelesaian atas permasalahan kinerja pegawai	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM
					Mengakselerasi penyusunan kebijakan internal tentang perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai di Lingkungan	0	0	0	1	1	drat kebijakan	Tersusunnya draf kebijakan tentang perlindungan dan/atau bantuan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Pemerintah Kota Bandung							Kota Bandung							
					Membangun dan/atau memanfaatkan sistem penilaian kompetensi pegawai/assessment center untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai	0	0	0	1	1	laporan	Terlaksananya Penilaian kompetensi melalui sistem penilaian kompetensi pegawai/assessment center	0	0	0	0	-	BKSPDM	BKPSDM
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK*	67,142	nilai	Pemilihan dan Pembentukan Tim Budaya Kerja (Agen Perubahan)	0	1	0	0	1	dokumen	Jumlah dokumen Roadmap dan Rencana Aksi Agenda Perubahan	0	0	0	0	-	BKSPDM	Bagian Organisasi dan BKPSDM
					Pelatihan "LIVING THE GRAND WHY" dan "GROWTH MINDSET PROGRAM"	0	0	0	65	0	orang	Jumlah Agen Perubahan yang mengikuti pelatihan	0	0	325.000.000	0	325.000.000	BKSPDM	BKPSDM
					Pelatihan "COACHING FOR MEANING PURPOSE TOWARDS PERFORMANCE" untuk Para JPT	0	0	0	38	0	orang	Jumlah JPT yang mengikuti pelatihan	0	380.000.000	0	0	380.000.000	BKSPDM	BKPSDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
					Pelatihan core values ASN melalui bandung learning canter (BLC) untuk seluruh ASN di Pemkot Bandung	0	5.500	0	0	5500	orang	jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan core value ASN melalui BLC	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKSPDM
					Pengukuran Culture Fit para JPT	0	0	0	38	0	orang	Jumlah JPT yang dilakukan pengukuran Culture Fit	0	0	0	2.717.000	2.717.000	BKPSDM	BKSPDM
					Pemilihan ASN Berprestasi yang Berakhlak	0	0	0	9	9	orang	Jumlah ASN Berprestasi yang berakhlak	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKSPDM
					Internalisasi penguatan employer branding dalam pelaksanaan pelayanan publik	0	1	0	0	1	dokumen	Intruksi Wali Kota Bandung tentang Penguatan Employer Branding	0	0	0	0	-	BKPSDM	Bagian Organisasi
		Employeeer Branding*	7,66	nilai	Implementasi penguatan employer branding pada Perangkat Daerah	0	1	1	1	3	laporan	Jumlah Laporan kegiatan penguatan employer branding pada Perangkat Daerah	0	0	0	0	-	BKPSDM	BKSPDM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	SATUAN TARGET	RENCANA AKSI	TARGET PENYELESAIAN					OUTPUT		ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI					PERANGKAT DAERAH	
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	PENANGGUNGJAWAB	PELAKSANA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	Nilai	Monev dan Asistensi		100 %		100 %	100%	Nilai	Laporan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan dan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat		31.203.000	55.194.750		86.397.750	Setda (Bagian Organisasi)	
		Indeks Pelayanan Publik	4,75	Laporan	Penilaian Mandiri				100 %	100%	Laporan	Laporan indeks pelayanan publik lingkup ketatalaksanaan			8.250.000	8.250.000	16.500.000	Setda (Bagian Organisasi)	

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002